

HENDRA KURNIAWAN TERSERET KASUS SAMBO

## Didakwa Berperan Mengganti DVR CCTV

JAKARTA (KR) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J mendakwa Hendra Kurniawan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdakwa dinyatakan merusak CCTV yang membuat terhalangnya penyidikan kasus pembunuhan Yosua.

Perbuatan itu, jelas JPU, dilakukan Hendra bersama dengan lima orang lainnya. "Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya," ungkap jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (19/10).

Dakwa yang dibacakan JPU secara bergantian, Hendra berperan dalam pergantian DVR kamera pemantau (CCTV) yang merekam semua kejadian di sekitar kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo (FS) di Duren Tiga Jakarta Selatan. Selain itu, Hendra juga mengetahui jika sa-

lah satu CCTV menampilkan tayangan Brigadir J yang masih hidup setelah FS tiba di rumah dinas. Tayangan CCTV itu berbeda dengan kronologi kejadian yang sudah diskenariokan FS.

Atas tindakan tersebut, jaksa dalam dakwaan primer kesatu, mendakwa Hendra Kurniawan telah melanggar Pasal 49 juncto Pasal 32 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya untuk dakwaan primer kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 233 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsidiar Pasal 221 ayat (1) ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Ancaman hukuman jika memenuhi

unsur Pasal 32 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Dalam persidangan perkara ini terdakwa yang dihadirkan adalah Brigjen Hendra Kurniawan bersama terdakwa lainnya Arif Rachman Arifin, Agus Nurpatia Adi Purnama, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo dan Irfan Widyanto. Terhadap perkara ini, berkas dakwaannya terpisahkan.

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel menanyakan kepada Hendra Kurniawan, apakah mengerti maksud dari dakwaan JPU tersebut? "Saya mengerti dan untuk eksepsi saya serahkan kepada kuasa hukum," kata Hendra di hadapan majelis hakim.

Henry Yosodiningrat, kuasa hukum Hendra Kurniawan menyatakan, tidak akan melakukan eksepsi untuk surat dakwaan tersebut. "Untuk menghormati asas peradilan cepat, murah dan sederhana, kami memandangi eksepsi," ungkapnya. (Fu)-f



KR-Franz Boedisukarnanto

Ketua Umum DPP Perbarindo 2018-2022 Joko Suyanto (kedua dari kanan) bersama para penerima cenderamata pada pembukaan Munas XI.

## MENKO PEREKONOMIAN BUKA MUNAS XI PERBARINDO BPR-BPRS Dukung UMKM Naik Kelas

YOGYA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto minta semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat kondisi perekonomian dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Industri perbankan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global ini.

"Perbankan termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-BPRS) diharapkan mampu mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar naik kelas melalui berbagai pembiayaan termasuk platform digital," ujar Airlangga Hartarto saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tahun 2022 di The Alana Hotel & Convention Center, Yogyakarta, Rabu (19/10). Munas XI dihadiri Plt Deputi Komisioner Regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko, Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi.

Ketua Umum Perbarindo Periode 2018-2022 Joko Suyanto menyampaikan, selain Munas, digelar pula UMKM Expo yang diikuti 50 UMKM binaan BPR-BPRS dan Sarasehan Nasional 'Penguatan Peran

BPR-BPRS Sebagai Mitra UMKM Menuju Pemulihan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional'. Diluncurkan pula BPR E-Cash dan empat buku tentang BPR-BPRS, serta dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama Perbarindo dengan Pefindo mengenai IDC Custom Score BPR.

Bambang Widjanarko menyampaikan, BPR-BPRS memiliki peran besar dalam menaikkan kelas UMKM yang jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, posisi strategis BPR-BPRS perlu ditingkatkan fungsinya, sehingga lebih banyak lagi membantu UMKM. "Kinerja industri BPR dan BPRS cukup baik terkait dengan permodalan, risiko kredit dan likuiditas yang terjaga dengan baik," ucapnya.

Menurut Joko Suyanto, Munas XI merupakan kegiatan pertama kali yang digelar DPP Perbarindo dengan melibatkan seluruh anggota di seluruh Indonesia melalui pertemuan fisik/luring sejak pandemi Covid-19. "Semoga semangat kita bersilaturahmi terus memperkuat dan menjaga semangat kebersamaan, gotong-royong, bahu-membahu dan menaikkan daya saing industri BPR dan BPRS," katanya.

Diakui, BPR-BPRS berperan penting dalam mendampingi UMKM. Bisa dikatakan BPR-BPRS ini seperti denyut nadi. (San)-f

## Tiga Kader Muhammadiyah Terima MPK Award

MALANG (KR) - Tiga orang kader teladan Muhammadiyah mendapatkan Award dari Majelis Pendidikan Kader (MPK) PP Muhammadiyah, di sela Rakornas di UM Malang, Selasa-Kamis (18-20/10). Ketiga peraih MPK Award tersebut adalah Drs Mohammad Djazman Al Kindi, Prof Malik Fadjar MSc dan Ir HM Dasron Hamid.

Penghargaan diserahkan Selasa (18/10) kepada putra/putri kader teladan. Hilman Muhammad mewakili keluarga Djasman Al-Kindi, Siska Nur Asyraf mewakili keluarga Dasron Hamid dan Nazaruddin Malik mewakili keluarga Malik Fadjar.

Drs Mohammad Djazman Al-Kindi (Ketua Pertama Badan Pendidikan Kader dan juga Rektor Pertama Universitas Muhammadiyah Surakarta). Prof A Malik Fadjar MSc adalah

Inisiator Ideologi, Politik, dan Organisasi (Ideopolitor) dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Ir H Dasron Hamid MSc Ketua Badan Pendidikan Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah juga Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir menyatakan, ketiga tokoh itu menjadi teladan penting bagi kader hari ini. "Pak Malik Fadjar, Pak Dasron Hamid, dan Pak Djazman memiliki peran yang penting. Ketulusan, pengabdian, dan kecintaannya terhadap Muhammadiyah luar biasa. Pak Djazman menggagas lahirnya Majelis Diktilitbang. Pak Malik merintis UM Malang dan memiliki banyak gagasan tentang pendidikan. Pak Dasron pu-

nya orientasi yang membangun, termasuk membangun Kampus UM Yogyakarta dari nol sampai sekarang," katanya.

Disebutkan, kunci dari keberlangsungan Muhammadiyah, Islam, dan bangsa, adalah perkaderan. Perkaderan dalam pandangan Muhammadiyah seperti anak panah yang siap dilepaskan. Mereka perlu terus mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan zaman.

"Kemampuan kader menjawab tantangan zaman ini perlu didukung sebuah sikap yang terbingkai dalam sebuah sikap. Kader Muhammadiyah sudah diajari untuk memiliki integritas, marwah, tidak korupsi, tidak menyimpang, tidak menyeleweng, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan," tambahnya. (Fsy)-d



KR-Istimewa



KR-Istimewa

Kegiatan Sosialisasi Perda DIY No 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan DIY

## DINAS KEBUDAYAAN KUNDHA KABUDAYAN DIY SOSIALISASI PERDA

# Ajak Warga Melek Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa

YOGYA (KR) - Di tengah derasnya modernisasi, budaya Jawa mesti ditampilkan secara utuh demi memberikan penanaman nilai-nilai terhadap tata krama yang diyakini masih relevan untuk diterapkan hingga sekarang. Menggunakan aksara Jawa bukan berarti hanya sebatas romantisme dan nostalgia ke zaman dahulu. Melainkan merevitalisasi keluhuran itu untuk kehidupan masa kini dan masa datang.

Masuknya era globalisasi dewasa ini membuat budaya Jawa yang salah satunya bahasa dan aksara Jawa terkikis. Faktanya sebagian besar masyarakat, terutama generasi muda, bahkan yang berasal dari Jawa banyak

yang tidak mengenal aksara Jawa. Mereka mengetahui keberadaannya, tapi kebanyakan sudah tidak bisa memahami ataupun sekadar membaca penguapannya.

Kepala Seksi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, Setya Amrih Prasaja mengatakan, pelestarian aksara Jawa semestinya dipandang sebagai langkah mutlak yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlangsungan budaya Jawa. Melestarikan aksara Jawa lanjut Amrih, berarti merawat kebudayaan Jawa yang menciptakan aneka bentuk ekspresi akan semakin memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia.

Menjawab fenomena tersebut, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY mengadakan sosialisasi perkembangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dari pentingnya melestarikan budaya, sastra dan aksara Jawa.

Kegiatan ini berlangsung secara langsung dengan metode tatap muka di Balai Dusun Sumber Balecatur Gamping Sleman dan dihadiri Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai SH MKn. Sasaran peserta kegiatan ini, yaitu warga di lokasi sekitar yang harapannya dapat turut menghidupkan kembali dan

melestarikan budaya, sastra dan aksara Jawa.

Secara umum, kegiatan ini bertujuan mendorong masyarakat dalam penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam berkomunikasi. Baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Selain itu, tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan penggunaan bahasa, sastra dan aksara Jawa bagi seluruh elemen masyarakat di lintas generasi.

Kegiatan ini mempunyai sasaran pada 60 tempat di wilayah DIY. Pelaksanaan kegiatan dimulai pada Mei 2022 hingga berakhir Oktober 2022 dengan lokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo,

Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

Amrih menambahkan, dalam bahasa Jawa tercermin adanya norma-norma susila, tata krama, menghargai yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Seseorang sering menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari, tapi kerap kali lupa bahwa terdapat tingkat tutur penggunaan bahasa Jawa yang dikenal sebagai penerapan unggah-ungguh. Sehingga makna tersirat itulah yang sebenarnya ingin disampaikan kepada para peserta sosialisasi. (Feb)-f